

Analisis Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

Dwi Arifin, Sonny SM Laksono

Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

Email dwicahya476@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to describe the execution of bureaucratic reforms and analyze the driving and implementation of bureaucratic reforms in the secretariat area of the Tulungagung district. In this study, it uses a qualitative method. The study was focused on how bureaucratic reforms were performed on the secretariat area of the Tulungagung district by looking at indicators of 8 areas of change that became the goal of bureaucratic reform. With the data collection technique of interviews, The observation and literature resulting from this research is the execution of bureaucratic reforms in the Tulungagung district is good enough as well as to realize the red tape advanced into world-class bureaucracy required to act on bureaucratic reforms with more exposures and impacts than in the process. A barrier factor in the attainment of bureaucratic reform due to a lack of strong leadership and inability to design and apply policy.

Keywords : *Analysis reforms, secretariat area of the Tulungagung district*

Latar Belakang Teoritis

Rencana aksi Reformasi Birokrasi perangkat daerah di pemerintahan Kabupaten Tulungagung wajib mempunyai tujuan serta target-target perubahan birokrasi sepanjang periode tertentu, tidak hanya itu rencana aksi reformasi birokrasi wajib selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulungagung. Perubahan manajemen birokrasi lewat reformasi birokrasi perangkat daerah yang terus menjadi baik diharapkan sanggup untuk menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang efisien serta efektif serta peningkatan akuntabilitas perangkat daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai sasaran kinerja yang berkaitan langsung dengan sasaran kinerja Kabupaten Tulungagung, untuk itu dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publiknya Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung berupaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi dengan mengacu pada Road Map Reformasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023. Peningkatan kinerja yang lebih efisien serta efektif pastinya akan mempengaruhi tingkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menganalisa faktor pendorong dan penghambat analisis reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.

Menurut Hague, Harrop, dan Breslin Setiyono(2016) birokrasi merupakan “organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan” (the bureaucracy consists of salaried officials who conduct the detailed business of government, advising on and applying policy decisions). Sementara itu, Kusrahjeng (2018) menyebutkan birokrasi dimaksudkan sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok untuk melaksanakan fungsi birokrasi pemerintah menurut Rashid dalam Setiyono, (2016:82) yaitu; 1) Memberikan pelayanan umum (service) yang bersifat rutin kepada masyarakat, 2) Melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat, 3) Menyelenggarakan pembangunan (development) di tengah masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 2 menyebutkan bahwa Sekretariat daerah merupakan unsur staf pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Selain itu Sekretariat Daerah

mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative.

menurut kauripan (2016) dalam penelitiannya menyebutkan adanya dampak dari komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada organisasinya, salah satunya nampak pada pemberian sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan tindakan KKN, hal ini merupakan salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, selain itu Suardi, Suryadinata et,al (2019) menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi dan budaya kerja mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai dan kesuksesan analisis Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja dipengaruhi oleh kepemimpinan dan tata kerja.

Sementara Wahyu dan Nugroho (2017) dalam penelitiannya melihat adanya beberapa faktor penghambat dalam analisis reformasi birokrasi di lokasi penelitian, faktor penghambat tersebut antara lain ,permasalahan jaringan internet yang kurang stabil, pembagian beban kerja yang belum proporsional dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan harapan untuk mencapai pelayanan prima, serta kurangnya informasi kepada pengguna layanan terkait persyaratan mendapat layanan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pada analisa data-data lapangan dan pengembangan penelusuran hasil temuan di lapangan guna mengejar hasil penelitian seakurat mungkin. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung dengan fokus penelitian menganalisa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung dengan melihat indikator 8 area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi yaitu; Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan, Penataan SDM Aparatur.

Sementara teknik mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan tehnik

wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Sedangkan Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data reduction dan data display.

Hasil Dan Pembahasan

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak seluruh unit organisasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa atau kinerjanya.

Hasil wawancara yang di paparkan oleh analis kelembagaan, pengolah data dan analis tatalaksana pada bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten Tulungagung, yang menyebutkan bahwa “ Pelayanan yang diberikan Sudah sesuai dalam memberikan pelayanan dengan dasar prosedur pada proses bisnis dan SOP yang telah disusun. Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Juga dilakukan komunikasi intens dengan seluruh Perangkat Daerah melalui grup WA yang dibentuk. Setda juga siap menerima konsultasi jika Perangkat Daerah menghadapi suatu permasalahan serta khusus pada pelaksanaan RB, setda dapat memantau secara realtime pada aplikasi. Sementara itu, Dari uraian diatas disimpulkan bahwa reformasi birokrasi yang ada di salah satu bagian sekretariat yaitu Bagian Organisasi sudah terlaksana dengan baik. Tentunya dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Grand Design Birokrasi dan Road Map Reformasi Birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden No 81 tahun 2010.

Menurut Analis Tatalaksana, analis kelembagaan, dan pengolah data bagian organisasi setda menjelaskan “Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan

reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document.

Dalam mencapai reformasi birokrasi yang tepat Kabupaten Tulungagung sudah berupaya sebaik mungkin dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya. Didukung dengan realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 Area sesuai dengan indicator road map yang sudah dirancang meliputi;

1) Area Manajemen Perubahan, berdasarkan LKE PMPRB Tahun 2020 skor manajemen perubahan di pemenuhan sebesar 1,67 (83,6 % dari bobot maksimal 2) sedangkan di reform sebesar 2,16 (71,9% dari bobot maksimal 3). Hal tersebut menunjukkan perlu peningkatan manajemen perubahan berdasarkan perubahan road map reformasi birokrasi Kabupaten Tulungagung.

2) Area Deregulasi Kebijakan Berdasarkan LKE PMPRB Tahun 2020 capaian deregulasi kebijakan yaitu sebesar 1.63 (81,2 % dari bobot maksimal 2) sedangkan di reform sebesar 2.77 (92,4 % dari bobot maksimal 3).

3) Area Penguatan Kelembagaan; Di tahun 2017 capaian nilai penataan komponen pengungkit penataan organisasi ialah sebesar 2,82. Kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,74. Dan di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni menjadi sebesar 3,39 dari bobot maksimal 6. Sedangkan capaian penataan dan penguatan organisasi berdasarkan LKE PMPRB di pemenuhan sebesar 2,15 (71,7 % dari bobot maksimal 3) dengan reform sebesar 3,32 (73,6 % dari bobot maksimal 4,5).

4) Area Penguatan Ketatalaksanaan capaian penataan tata laksana berdasarkan LKE PMPRB Tahun 2020 di pemenuhan sebesar 1,55 (62 % dari

bobot maksimal 2,5) dengan reform sebesar 2,31 (61,4 % dari bobot maksimal 3,75).

5) Area Sistem Manajemen SDM capaian penataan sistem manajemen SDM berdasarkan LKE PMPRB Tahun 2020 di pemenuhan sebesar 2,70 (89,9 % dari bobot maksimal 3) dengan reform sebesar 1,95 (43,3 % dari bobot maksimal 4,5).

6) Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja capaian penguatan akuntabilitas berdasarkan LKE PMPRB Tahun 2020 di pemenuhan sebesar 2,32 (92,8 % dari bobot maksimal 2,5) dengan reform sebesar 2,91 (77,5 % dari bobot maksimal 3,75).

7) Area Penguatan Pengawasan capaian LKE PMPRB Tahun 2020 di pemenuhan sebesar 1,79 (71,5% dengan bobot maksimal 2,5) dengan reform sebesar 2,68 (71,4 % dengan bobot maksimal 3,75).

8) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik capaian peningkatan pelayanan publik berdasarkan LKE PMPRB Tahun 2020 di pemenuhan sebesar 1.92 (76,7% dari bobot maksimal 2,5) dengan reform sebesar 3.29 (87,6% dari bobot maksimal 3,75).

Pembahasan

1. Faktor Pendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

Dari hasil wawancara dari beberapa nara sumber yaitu bagian perencanaan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari bagian pengadaan barang/jasa. Selain itu dari bagian administrasi pembangunan, bagian hukum, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian tata pemerintahan, mengemukakan pendapat mereka terkait dengan faktor yang dapat mendorong tercapainya reformasi birokrasi di kabupaten Tulungagung. adapun faktor yang di sebut menjadi pendorong dalam tercapainya reformasi birokrasi yang tepat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung antara lain; 1) Komitmen Pimpinan, 2) Melibatkan Pegawai, 3) Legilasi Pendukung, 4) Penggunaan Teknologi, 5) Komunikasi Efektif, Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berhasil tidak nya reformasi birokrasi terletak pada sumber daya manusianya.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

Belum optimalnya analisis reformasi birokrasi disebabkan beberapa faktor. Permasalahan yang menyebabkan analisis reformasi birokrasi belum optimal, diantaranya adalah pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber dari bagian sekretariat daerah Kabupaten Tulungagung didapatkan hasil bahwa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi tercapainya reformasi birokrasi yaitu 1) Kurangnya Kepemimpinan yang Kuat, 2) Pegawai yang tidak mendukung atau bahkan menentang perubahan dapat menjadi hambatan serius, 3) Ketidakmampuan merancang dan menerapkan kebijakan, 4) Teknologi dan Infrastruktur yang Tidak Memadai, 5) Kepemimpinan yang tidak komitmen.

Pada dasarnya reformasi birokrasi ini merupakan langkah utama bagi kita untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih bersih, efektif, dan efisien. Sehingga perlu kerjasama yang bersinergi antara atasan dengan bawahan sehingga akan tercipta komunikasi yang baik untuk bersama – sama mencapai reformasi birokrasi yang baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pegawai sudah sepenuhnya sadar dan tahu bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Tulungagung sudah cukup baik serta untuk mewujudkan birokrasi maju menuju Birokrasi Berkelas Dunia diperlukan akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan penajaman yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Sementara itu dalam penerapannya didukung dengan realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 Area sesuai dengan indicator road map yang sudah dirancang yaitu, Area manajemen perubahan, Area Deregulasi Kebijakan, Area Penguatan Kelembagaan, Area Penguatan Ketatalaksanaan, Area Sistem Manajemen SDM, Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Area Penguatan Pengawasan.

Sedangkan untuk Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung diketahui jika dari masing – masing faktor mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Seperti pada faktor pendorong pelaksanaan reformasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik, itulah makna yang sebenarnya dari Revolusi Mental di bidang aparatur peradilan. Berhasil tidak nya reformasi birokrasi terletak pada sumber daya manusianya. Maksud nya yaitu ketika seorang pemimpin apabila tanpa komitmen, maka mustahil akan terjadi perubahan.

Daftar Pustaka

- Dwi Wahyu Aris Setio Nugroho. *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen*. 2017, Universitas Negeri Semarang
- Josef Kurniawan Kairupan. *Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Administrasi Publik 2016, Sam Ratulangi University
- Peraturan Bupati Tulungagung no. 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Suardi, Ermaya Suryadinata, Kusworo, Ali Hanafiah Muhi. *Pengaruh Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di RSUD DR. R. SOEDJONO SELONG, Kabupaten Lombok Timur*. JURNAL PAPTUNG: Vol. 2 No. 3 Tahun 2019, ISSN: 2715-0186, Institut Pemerintahan Dalam Negeri